

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Dalam menjalankan aktivitasnya tersebut, perusahaan harus memiliki rasa tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat. Apabila memungkinkan, disamping mendapatkan keuntungan bagi perusahaan sendiri juga sekaligus memberikan kesejahteraan bagi lingkungan masyarakat sekitar. Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat luas, sehingga perusahaan tidak hanya bertanggungjawab kepada investor dan kreditor tetapi juga kepada pihak lain selain stakeholders yaitu kepada karyawan, supplier, pelanggan, lembaga pemerintah, dan lingkungan masyarakat dimana perusahaan berada..

Sebagai bagian tak terpisahkan dari perusahaan, akuntansi berupaya mengakomodasi perubahan kecenderungan tersebut dengan melahirkan subdisiplin akuntansi sosial. Terdapat pergeseran yang mendasar yang dilakukan disiplin akuntansi yaitu paradigma pertanggungjawaban. Bila selama ini produk akuntansi dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik saham, kini paradigma tersebut diperluas menjadi pertanggungjawaban kepada seluruh stakeholders.

Sehingga ukuran prestasi kinerja yang baik bagi perusahaan tidak hanya memperoleh laba yang maksimal untuk kesejahteraan stockholder tetapi juga kesejahteraan sosial dan lingkungan, seperti yang diungkapkan Gluek & Jauch (1984) bahwa tujuan perusahaan meliputi profitabilitas, efisiensi, kepuasan dan pengembangan karyawan, tanggung jawab sosial dan hubungan baik dengan masyarakat serta kelangsungan hidup usaha. Oleh karena itu perusahaan sebagai organisasi bisnis harus mampu merespon apa yang dituntut oleh lingkungan sosialnya, sehingga entitas bisnis dan entitas sosial dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk kepentingan bersama.

Tanggungjawab sosial terbagi menjadi tiga tahap menurut Hay and Gray (Gray dan Smeltzr, 1990), yaitu tahap pertama, Profit maximimizing management, perusahaan hanya mempunyai satu tujuan yaitu memaksimalkan laba yang ditujukan kepada pemilik perusahaan. Manajer berfikir bahwa dengan memaksimalkan laba akan baik bagi lingkungan sosialnya. Tahap kedua, trusteeship management, manager bertanggungjawab kepada pemilik, pelanggan, supplier dan pihak-pihak lainyang memberikan kontribusi bagi perusahaan. Laba bagi pemilik penting , begitu juga kepuasan kontributornya. Tahap ketiga, quality of life management, manajemen mulai menyadari bahwa problem yang muncul adalah akibat dari keseuksesan di bidang ekonomi baik langsung ataupun tidak langsung, seperti polusi dan kerusakan lingkungan. Pada tahap ini mulai dipikirkan tanggungjawab sosial perusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Aksi protes terhadap perusahaan seringkali dilakukan oleh para karyawan dan buruh dalam rangka menuntut kebijaksanaan upah dan pemberian fasilitas kesejahteraan lainnya yang dirasakan kurang mencerminkan rasa keadilan. Aksi protes serupa juga tidak jarang dilakukan oleh pihak masyarakat, baik sebagai konsumen, maupun masyarakat yang berada disekitar lingkungan pabrik. Masyarakat sebagai konsumen seringkali melakukan protes terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mutu produk sehubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kehalalan suatu produk bagi konsumen. Sedangkan protes yang dilakukan oleh masyarakat disekitar pabrik biasanya berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabrik.

Heard dan Bolce (1981) berpendapat bahwa, sebelumnya masyarakat memandang perusahaan hanya bertanggungjawab dalam penyediaan barang dan jasa, lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun tuntutan masyarakat telah berubah drastis, ketika lingkungan hidup menjadi semakin rusak dan menjadi tidak sehat, sumber-sumber alam semakin menipis, bumi semakin panas dan padat, serta pembagian pendapatan menjadi semakin timpang. Pada saat ini masyarakat menuntut masalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan harus menjadi tanggungjawab perusahaan, bukan tanggungjawab masyarakat sehingga harus dipeertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan.

Penetapan pelaporan keuangan dalam suatu proses perekayasaan akuntansi harus memperhatikan apa yang menjadi tujuan sosial ekonomi negara tempat akuntansi akan diterapkan. Ketidak konsistenan antara tujuan pelaporan keuangan

dengan tujuan sosial ekonomi akan menyebabkan kekacauan dalam praktek akuntansi, yaitu arah yang tidak jelas dari akuntansi sendiri. Kekacauan ini terlihat jelas jika akuntansi tidak lagi mampu menjadi alat pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Jika pihak luar yang merasa mempunyai kepentingan terhadap aktivitas perusahaan tidak lagi puas dengan pertanggungjawaban manajemen melalui media laporan keuangan, maka kepercayaan masyarakat terhadap akuntansi akan berkurang. Setiap pelaku ekonomi mempunyai tanggungjawab terhadap tujuan ekonomi nasional. Jika tanggungjawab sosial ini juga merupakan bagian dari tanggungjawab manajemen, maka alat pertanggungjawaban manajemen kepada pihak eksternal harus pula konsisten dengan tanggungjawab sosialnya. Dengan demikian proses penetapan tujuan pelaporan keuangan harus pula mempertimbangkan tujuan sosial ekonomi.

Kemudian jika permasalahan akuntansi sosial ini dikatkan dengan prinsip dasar good corporate governance(GCG) yang menjadi isu penting pengelolaan perusahaan saat sekarang ini, khususnya pada prinsip Responsibility yang berbicara tentang bagaimana entitas bisnis bertanggungjawab kepada stakeholders dan juga lingkungan, Satyo (2001) menulis bahwa prinsip dasar good corporate governance (pengelolaan yang baik), ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan laporan bukan hanya kepada para pemegang saham, calon investor, kreditur dan pemerintah semata tetapi juga kepada stakeholders lainnya, seperti masyarakat umum, konsumen, serikat pekerja dan karyawan perusahaan, dimana perusahaan dalam menjalankan operasinya selalu berupaya meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga perusahaan tidak hanya mementingkan motif bisnisnya saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat.

Praktek pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial bagi perusahaan di Indonesia dapat berpedoman kepada standar yang telah dikeluarkan dan diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dimana secara implisit telah mengakomodasi hal tersebut. Sebagaimana tertulis pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 1(Revisi 1998) paragraf 9 yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (Value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”

Berdasarkan PSAK diatas, perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat melaporkan kegiatan sosialnya untuk dikomunikasikan kepada pihak luar dalam bentuk laporan nilai tambah, sehingga dapat dipahami bahwa upaya untuk pelaporan tanggungjawab sosial perusahaan sudah diakomodir oleh profesi akuntan di Indonesia.

Istilah akuntansi sosial sebenarnya bukan merupakan istilah baku dalam akuntansi, para pakar akuntansi membuat istilah masing-masing untuk menggambarkan transaksi antara perusahaan dengan lingkungannya. Ramanathan (1976) dalam Arief Suadi (1988) mempergunakan istilah akuntansi sosial dan

mendefinisikannya sebagai proses pemilihan variabel-variabel yang menentukan tingkat prestasi sosial perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Lee D Parker (1986) dalam Arief Suadi (1988) menggunakan istilah Sosial Responsibility Accounting, yang merupakan cabang dari ilmu akuntansi. Sementara itu Belkoui dalam Harahap (1993) membuat sebuah terminologi social Economic Accounting (SEA) yang berarti proses pengukuran, pengaturan dan pengungkapan dampak pertukaran antara perusahaan dan lingkungannya.

Hadibroto (1988); Bambang Sudibyo (1988) dan para pakar akuntansi di Indonesia menggunakan istilah akuntansi pertanggungjawaban sosial (APS) sebagai akuntansi yang memerlukan laporan mengenai terlaksananya pertanggungjawaban sosial perusahaan. Hendrikson (1994), menggambarkan akuntansi sosial sebagai suatu pernyataan tujuan, serangkaian konsep sosial dan metode pengukurannya, struktur pelaporan dan komunikasi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pernyataan Hendrikson (1994) tersebut memberikan gambaran tentang hubungan mendasar antara konsep akuntansi sosial dengan informasi yang dihasilkan, sehingga secara konkrit informasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas dengan melihat definisi dan tujuannya, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik akuntansi sosial meliputi:(1) identifikasi dan pengukuran dampak sosial yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan; (2) pelaporan atas tanggungjawab sosial yang dibebankan pada perusahaan; (3) mengevaluasi prestasi sosial perusahaan; dan (4) menyediakan informasi yang memungkinkan penilaian komprehensif atas seluruh sumber daya dan akibat-

akibat sosial ekonomi. Dampak dari aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan sering disebut *eksternalitas*. *Eksternalitas* terdiri dari eksternal economies dan eksternal diseconomies. Eksternal economies terjadi bila aktivitas-aktivitas perusahaan menyebabkan kenaikan sumberdaya sosial dan dianggap sebagai eksternal benefit yang merupakan kontribusi perusahaan kepada masyarakat. Sedangkan diseconomies terjadi bila aktivitas perusahaan menyebabkan penurunan sumber daya sosial dan dianggap sebagai eksternal cost atau sosial cost yang merupakan kerusakan yang diakibatkan oleh perusahaan.

Pelaporan kinerja sosial sebagai wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengungkapan sosial dengan memanfaatkan laporan tahunan sebagai media penyampaian informasi. Informasi-informasi sosial yang diungkapkan pada laporan tahunan ini dapat mempengaruhi keputusan ekonomis yang dibuat oleh para pemakai laporan keuangan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seringkali perusahaan memutuskan untuk melakukan pengungkapan sosial ini secara sukarela walaupun dalam prakteknya terdapat kecenderungan pengungkapan informasi sosial ini hanya difokuskan untuk informasi yang bersifat positif. Semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan secara sukarela diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas manajemen, pemahaman para analis terhadap perusahaan, kesabaran dan keyakinan para investor, serta meningkatkan nilai saham secara potensial, sehingga dapat menjembatani dan meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial yang muncul pada dunia usaha (entitas bisnis) di Indonesia.

Walaupun konsep tanggungjawab sosial telah ada dan berkembang, tapi masih ada pro dan kontra. Pihak yang pro memandang perusahaan sebagai sistem sosial ekonomi yang harus tanggap terhadap kepentingan sosial, sedangkan pihak yang tidak setuju memandang perusahaan sebagai sistem ekonomi yang hanya bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan (Yudiani, 1998). Meski masih menjadi pro dan kontra mengenai pertanggungjawaban sosial, tapi yang jelas perusahaan seharusnya memiliki tanggungjawab sosial. Karena perusahaan yang tidak melaksanakan tanggungjawab sosialnya akan menyebabkan simpati masyarakat berkurang. Akibatnya akan mengurangi profit perusahaan karena masyarakat adalah konsumen potensial bagi perusahaan. Kalau hal ini terjadi terus-menerus tanpa ada tindakan yang proaktif dalam merespon harapan masyarakat, maka kelangsungan hidup perusahaan bisa dipastikan akan terancam. Respon perusahaan terhadap tanggungjawab sosial akan menimbulkan suatu kebutuhan untuk mengukur dan melaporkan kinerja perusahaan menjadi semakin luas, sehingga hal ini dapat mendorong berkembangnya akuntansi sosial.

Sebuah analisis yang dilakukan oleh Bambang Sudibyo (1998) dalam Arief Suadi (1988) menyimpulkan bahwa terdapat dua hal yang menjadi kendala sulitnya penerapan akuntansi sosial di Indonesia, yaitu (1) lemahnya tekanan sosial yang menghendaki pertanggungjawaban sosial perusahaan, (2) rendahnya kesadaran perusahaan di Indonesia tentang pentingnya pertanggungjawaban sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2000) juga menyimpulkan bahwa pengungkapan sosial oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia relatif masih sangat rendah, dan diduga perusahaan tidak memanfaatkan laporan tahunan

sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan stakeholders lainnya. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Heny dan Murtanto (2001) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan sosial di Indonesia masih relatif rendah yaitu 42,32 %. Pengungkapan sosial dilakukan oleh perusahaan paling banyak ditemui pada bagian catatan atas laporan keuangan dan tipe pengungkapan yang paling banyak digunakan adalah tipe naratif kualitatif.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengajukan penelitian dengan judul “EVALUASI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL DALAM LAPORAN TAHUNAN (STUDI KASUS PT. KIHO BALI KORIN SLEMAN) ”.

1.2. Pokok Masalah

1. Apakah PT. Kiho Bali korin perlu menerapkan laporan pertanggungjawaban sosial?
2. Keuntungan apa yang didapat oleh perusahaan bila menerapkn laporan pertanggungjawaban sosialnya?
3. Bagaimana proses dan format laporan pertanggungjawaban sosial yang harus dibuat?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini berusaha menerapkan metode laporan pertanggungjawaban sosial dengan menggunakan metode inventory approach dan cost approach. Aktivitas – aktivitas yang akan dianalisis yaitu aktivitas - aktivitas yang berhubungan dengan tanggungjawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, produk, konsumen, masyarakat dan lingkungan dengan mengidentifikasi biaya-biaya yang terjadi dalam hal penanganan limbah, ketenagakerjaan, konsumen serta biaya-biaya sosial lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2002.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sejauh mana perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosialnya

2. Memberikan gambaran bagi perusahaan secara teoritis jika menerapkan konsep akuntansi pertanggungjawaban.
3. Menerapkan laporan pertanggungjawab sosial pada PT. Kiho Bali Korin.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

- Dapat memberikan motivasi positif agar perusahaan lebih peka terhadap masalah sosial.
- Dengan adanya komunikasi antara perusahaan dengan lingkungan social melalui pengungkapan social perusahaan secara periodik dapat menjembatani dan meminimalisir permasalahan social yang muncul pada dunia usaha.
- Dilihat dari perspektif ekonomi, sosial, politik, Laporan Pertanggung jawaban sosial dianggap sebagai dokumen sosial, politik, ekonomi sehingga perusahaan akan mendapatkan dukungan sosial politik dari berbagai pihak yang berpengaruh.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya
- Menambah sumbangan pemikiran dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

1.6. Metode Penelitian

1. Data yang diperlukan

Data Umum

- Sejarah dan Perkembangan Perusahaan
- Lokasi Perusahaan
- Struktur Perusahaan
- Proses Produksi

Data Khusus

- Data yang dibutuhkan berupa informasi-informasi yang berkaitan dengan aktivitas sosial Perusahaan dengan lingkungan sosialnya.

2. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode:

2.1. Observasi

Merupakan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang terjadi pada obyek penelitian

2.2. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada pihak-pihak perusahaan, untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian.

2.3. Studi Pustaka

Dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan akuntansi sosial dan hubungan langsung dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

3. Metode Analisa data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan membuat gambaran, meringkas dan memilah data-data yang berhubungan dengan akuntansi pertanggungjawaban sosial dan yang tidak berhubungan dengan akuntansi pertanggungjawaban, dengan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi data-data mengenai kegiatan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya terhadap masyarakat di lingkungan perusahaan.
2. Melakukan analisis terhadap bentuk dari laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan berdasarkan berdasarkan teori-teori yang sudah ada, yang akan diterapkan pada perusahaan.
3. Membuat kesimpulan akhir berdasarkan data dan informasi relevan yang diperoleh.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini akan memberikan gambaran umum dari penelitian yang terdiri dari

- 1.1. Latar belakang masalah
- 1.2. Pokok masalah
- 1.3. Batasan masalah
- 1.4. Tujuan dan manfaat penelitian
- 1.5. Manfaat penelitian
- 1.6. Metode penelitian

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini mencakup tinjauan kepustakaan mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial,

- 2.1. Latar belakang akuntansi sosial
- 2.2. Akuntansi sosial
- 2.3. Konsep akuntansi sosial
- 2.4. Pelaporan keuangan
- 2.5. Tanggungjawab sosial perusahaan
- 2.6. Penelitian terdahulu

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang PT. Kiho Bali Korin.

- 3.1. Sejarah berdirinya PT Kiho Bali Korin
- 3.2. Penentuan lokasi / alasan-alasan pendirian PT Kiho Bali Korin
- 3.3. Struktur organisasi PT Kiho Bali Korin
- 3.4. Visi, misi, dan strategi perusahaan
- 3.5. Sumberdaya manusia yang dimiliki perusahaan

- 3.6. Proses dan hasil produksi dan produk yang dihasilkan PT Kiho
- 3.7. Utilitas
- 3.8. Partisipasi perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan hidup dan program pemerintah

Bab IV : Analisis data dan pengolahan

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai hasil yang diperoleh melalui pengamatan di perusahaan yaitu:

- 4.1. Analisis pertanggungjawaban sosial PT Kiho Bali Korin
- 4.2. Pentingnya laporan pertanggungjawaban sosial bagi PT Kiho Bali Korin
- 4.3. Manfaat bagi PT Kiho Bali Korin bila menerapkan laporan pertanggungjawaban sosial
- 4.4. Model alternatif laporan pertanggungjawaban sosial

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan penulis, yang berisikan:

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Latar Belakang Akuntansi Sosial

2.1.1. Perubahan Tuntutan Masyarakat

Dalam satu dekade terakhir ini wajah dunia industri di Indonesia diwarnai dengan berbagai konflik industri seperti demonstrasi dan protes yang menyiratkan ketidakpuasan beberapa elemen stakeholders pada manajemen perusahaan. Para uruh sering melakukan demo dan mogok kerja akibat kebijakan upah dan pemberian fasilitas kesejahteraan yang diterapkan perusahaan kurang mencerminkan rasa keadilan. Kasus lain yang kerap muncul adalah protes dari masyarakat sekitar pabrik yang merasa terganggu akibat limbah atau polusi yang dilepas ke lingkungan (Sri Murni 2001: 155-156).

Menurut pendekatan teori akuntansi tradisional perusahaan harus memaksimalkan labanya agar dapat memberikan sumbangan yang maksimum kepada masyarakat, namun seiring dengan perjalanan waktu seperti deskripsi tersebut diatas, masyarakat semakin menyadari adanya dampak-dampak sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam melakukan operasinya untuk mencapai laba yang maksimal, yang semakin lama dirasakan semakin besar dan semakin sulit untuk dikendalikan. Hal ini dikarenakan semakin berkerbangnya pola pikir masyarakat yang membuat mereka semakin kritis terhadap keberadaan perusahaan, masyarakat menyadari bahwa dalam melaksanakan Legiatannya perusahaan akan mempengaruhi kelangsungan hidup lingkungannya sehingga

perusahaan harus dapat melihat pengaruhnya dan memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungannya (Henny dan Murtanto 2001:22-23).

2.1.2. Perubahan Tanggung Jawab Perusahaan

Pergeseran filosofis pengelolaan entitas bisnis yang mengalami perubahan dari pandangan manajemen klasik ke manajemen modern khususnya di beberapa negara industri seperti Amerika dan Eropa telah melahirkan sebuah orientasi baru tentang tanggungjawab perusahaan. Pandangan manajemen klasik tentang tanggungjawab perusahaan yang hanya berorientasi kepada pemilik modal dan kreditur dengan mencapai tingkat laba yang maksimal telah bergeser dengan adanya konsep manajemen modern, dimana orientasi perusahaan dalam mencapai laba yang maksimum perlu dihubungkan dengan tanggungjawab sosial perusahaan karena keseimbangan antara tuntutan para pemilik perusahaan, kebutuhan para pegawai, pelanggan, pemasok, lingkungan dan jaga masyarakat umum, karena menurut pandangan manajemen modern perusahaan dalam menjalankan operasinya harus berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya semuanya berasal dari lingkungan sosial dimana perusahaan itu berada (Azizul Kholis:2002;28). Oleh karena itu perusahaan sebagai organisasi bisnis harus mampu merespon apa yang dituntut oleh lingkungan sosialnya, sehingga entitas bisnis dan entitas sosial dapat saling berinteraksi untuk kepentingan bersama. Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan perekonomian dan masyarakat luas, sehingga suatu perusahaan tidak hanya bertanggungjawab

kepada investor dan kreditor, tetapi juga kepada golongan masyarakat luas yang lain. Badan usaha yang besar sebenarnya merupakan semacam lembaga masyarakat yaitu wadah untuk bekerja sama dalam menjalankan perusahaan berskala besar (Suwardjono 1989: 25).

2.2. Akuntansi Sosial

2.2.1. Defenisi Akuntansi dan Akuntansi Sosial

Akuntansi adalah aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan data kuantitatif terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif (APB Statement No. 4 dalam Sri Murni:156).

Istilah Akuntansi Sosial (*Social Accounting*) sebenarnya bukan merupakan istilah baku dalam akuntansi. Pakar akuntansi membuat istilah masing – masing untuk menggambarkan transaksi antara perusahaan dengan lingkungannya. Berikut ini adalah salah satu istilah dan pengertian dalam akuntansi sosial ekonomi:

“Akuntansi sosial ekonomi timbul dari penerapan akuntansi dalam ilmu sosial, ini menyangkut pengaturan, pengukuran analisis dan pengungkapan pengaruh ekonomi dan sosial dari kegiatan perusahaan. Hal ini termasuk kegiatan yang bersifat makro dan mikro. Pada tingkat makro bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan kegiatan ekonomi dan sosial negara, mencakup *social accounting* dan *reporting* peranan akuntansi dalam pembangunan ekonomi. Pada tingkat mikro bertujuan untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungannya, mencakup *financial* dan *managerial social accounting, social auditing*”. (Belkaoui dalam Harahap, 2001:349)

Selain pengertian diatas, ada beberapa pengertian menurut para pakar mengenai akuntansi social yaitu:

- 1) Ramanathan (1976) dalam Arief Suadi (1988) mempergunakan istilah Sosial Accounting dan mendefinisikan sebagai proses pemilihan variable-variabel yang menentukan tingkat prestasi social perusahaan baik secara internal maupun eksternal.
- 2) Lee D Parker (1986) dalam Arief Suadi (1988) menggunakan istilah Social Responsibility Accounting, yang merupakan cabang dari ilmu akuntansi.
- 3) Belkoui dalam Harahap (1993) membuat suatu terminologi Socio Economic Accounting (SEA) yang berarti proses pengukuran, pengaturan dan pengungkapan dampak pertukaran antara perusahaan dengan lingkungannya.
- 4) Hadribroto (1988); Bambang Sudibyo (1988) dan para pakar akuntansi di Indonesia menggunakan istilah Akuntansi pertanggung jawaban social (APS) sebagai akuntansi yang memerlukan laporan mengenai terlaksananya pertanggungjawaban social perusahaan
- 5) Hendriksen (1994) menggambarkan akuntansi social sebagai suatu pernyataan tujuan, serangkaian konsep social dan metode pengukurannya, struktur pelaporan dan komunikasi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan..

Akuntansi social merupakan pengidentifikasian, pengukuran, analisis konsekuensi dan social antara perusahaan dengan lingkungannya (Freedman, 1989). Sedangkan menurut Mathews dan Perrera (1996), akuntansi social digunakan untuk menggambarkan bentuk komprehensif akuntansi yang memasukkan externalities kedalam rekening perusahaan seperti informasi tentang tenaga kerja , produk dan pencegahan atau pengurangan polusi.

2.2.2. Tujuan Akuntansi Sosial

Tujuan Akuntansi Sosial menurut Hendriksen (1994) adalah memberikan informasi yang yang memungkinkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap masyarakat dapat dievaluasi. Ramanathan (1976) dalam Arief Suadi (1988) juga menguraikan tiga tujuan dari akuntansi social yaitu :

1. Mengidentifikasi dan mengukur kontribusi social netto periodic suatu perusahaan yang meliputi bukan hanya manfaat dan biaya social yang diinternalisasikan ke perusahaan, namun juga timbul dari eksternalitas yang mempengaruhi segmen-segmen social yang berbeda
2. Membantu menentukan apakah strategi dan praktek perusahaan yang secara langsung mempengaruhi relatifitas sumber daya dan status individu, masyarakat dan segmen- segmen social adalah prioritas social yang diberikan secara luas pada satu pihak dan aspirasi individu pada pihak lain
3. Memberikan dengan cara yang optimal kepada semua kelompok social , informasi yang relevan tentang tujuan, kebijakan, program, strategi dan kontribusi suatu perusahaan terhadap tujuan-tujuan social perusahaan.

Berdasarkan definisi dan tujuan akuntansi social tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik akuntansi social meliputi:

1. Identifikasi dan pengukuran dampak social yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan
2. Melaporkan tanggung jawab social perusahaan
3. Mengevaluasi prestasi social perusahaan

4. Menyediakan informasi yang memungkinkan penilaian komprehensif atas seluruh sumberdaya dan akibat-akibat social ekonomi

2.2.3. Peran Akuntansi Sosial

Akuntansi Sosial secara teoritis mensyaratkan perusahaan harus melihat lingkungan sosialnya antara lain masyarakat, konsumen, pekerja, pemerintah dan pihak lain yang dapat mendukung jalannya operasional perusahaan. Untuk mendapatkan gambaran inilah perusahaan harus mampu mengakses lingkungan sosialnya, setelah itu untuk menindak lanjuti dan mengukur kepekaan itu perusahaan memerlukan informasi secara periodical, sehingga informasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Disinilah peran Akuntansi sosial diharapkan dapat merespon lingkungan sosialnya sebagai perwujudan kepekaan dan kepedulian entitas bisnis terhadap lingkungan sosialnya sehingga dapat meminimalisir permasalahan sosial yang dihadapi oleh entitas bisnis di Indonesia dan dapat mendukung kelangsungan hidup entitas tersebut.

2.3. Konsep Akuntansi Sosial

2.3.1. Pengungkapan pertanggung jawaban social

Salah satu jalan untuk mewujudkan socio economic accounting adalah dengan menerapkan prinsip transparansi . Prinsip ini ditunjukkan dengan pengungkapan (*disclosure*) informasi financial maupun non financial. Dalam pengertian umum, pengungkapan berarti mengeluarkan atau mengumumkan

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan.

Praktik Pengungkapan Sosial di Indonesia dapat berpedoman kepada standar yang dikeluarkan dan diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Hal ini secara eksplisit telah diakomodasi dalam PSAK No.1 Paragraf 9 yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

2.3.1.1. Teori Kecenderungan Pengungkapan Sosial

Teori – teori yang dipergunakan oleh para peneliti untuk menjelaskan kecenderungan pengungkapan social dapat digolongkan kedalam tiga kelompok yaitu:

1. *Decision usefulness studies*: Pengungkapan social dilakukan karena informasi tersebut dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan dan ditempatkan pada posisi yang *moderately important*.
2. *Economic theory studies* : Sebagai agen dari suatu principal yang mewakili seluruh interest group perusahaan, pihak manajemen melakukan pengungkapan social sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan public
3. *Social and Political theory studies* : Studi di bidang ini menggunakan teori Stakeholder, teori legitimasi organisasi dan teori ekonomi politik. Teori stakeholder mengasumsi bahwa eksistensi

perusahaan ditentukan oleh para stakeholders. Teori legitimasi mengatakan harus adanya keselarasan antara nilai perusahaan dengan nilai sosial masyarakat dimana perusahaan tersebut berada, dengan adanya hal ini maka keberadaan perusahaan dilingkungan masyarakat akan mendapat pengakuan dan dukungan penuh dari masyarakat lingkungan sosial tersebut. Teori ekonomi politik menjelaskan bahwa adanya hubungan antara institusi sosial seperti pemerintah dengan hak guna usaha, hal ini menandakan bahwa pemerintah mempunyai kekuatan yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi perusahaan. (Gray et. Al dalam Utomo, 2000)

2.3.1.2. Alasan pengungkapan Sosial

Pengungkapan Kinerja Sosial pada Laporan tahunan perusahaan seringkali dilakukan secara suka rela oleh perusahaan. Adapun alasan-alasan perusahaan untuk mengungkapkan kinerja sosial secara sukarela (Henderson dan Peirson, 1998) yaitu :

1. *Internal Decision making* : Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas dari informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan. Data harus tersedia agar biaya dari pengungkapan tersebut bisa dibandingkan dengan manfaat bagi perusahaan. Walaupun hal ini sulit diidentifikasi dan diukur, namun analisis secara sederhana lebih baik daripada tidak sama sekali.
2. *Product Differentiation*: Manajer dari perusahaan yang bertanggung jawab sosial memiliki insentif untuk membedakan diri dari pesaing

yang tidak bertanggungjawab secara sosial kepada masyarakat. Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatan biaya dan manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan yang tidak bertanggung jawab akan terlihat lebih sukses daripada perusahaan yang bertanggungjawab. Hal ini mendorong perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga masyarakat dapat membedakan mereka dari perusahaan lain.

3. *Enlightened Self Interest* : Perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosialnya dengan para stakeholder yang terdiri dari Stakeholder, kreditor, karyawan, pemasok, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyarakat karena mereka dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham.

2.3.1.3. Sifat Pengungkapan Sosial

Pengungkapan memiliki beberapa sifat. Semuanya berusaha untuk menampilkan informasi aspek financial dan non financial perusahaan. Tiga sifat pengungkapan yang umum dikenal dalam praktek laporan keuangan:

1. *Adequate disclosure* terkait dengan kuantitas unsur yang diungkapkan
2. *Fair disclosure* lebih terkait dengan aspek etis untuk memberikan informasi yang sama rata dan sama rasa kepada semua pengguna.
3. *Full disclosure* menampilkan seluruh informasi yang relevan.

2.3.1.4. Faktor – faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Sosial

Ada beberapa factor yang mempengaruhi pengungkapan sosial. Pertama, Peraturan pemerintah melalui pengesahan parlemen ataupun dalam bentuk peraturan yang ditetapkan pemerintah. Kedua, yaitu penetapan standar. Penerapan Standar pelaporan dan pengungkapan khususnya dibidang informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan oleh berbagai badan pembuat standar akuntansi diberbagai Negara. Salah satunya, vredeling proposal yang dikeluarkan Uni Eropa yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai dampak socio Economy.

Faktor ketiga yang mempengaruhi terwujudnya sosial disclosure adalah tekanan interest group. Persatuan dagang dan Serikat pekerja merupakan salah satu interest group yang cukup banyak memberikan tekanan terhadap perusahaan agar mengeluarkan social responsibility disclosure. Dan factor terakhir yaitu adanya kesadaran perusahaan itu sendiri, berdasarkan prespektif ekonomi-politik perusahaan akan bersikap proaktif untuk merumuskan pandangannya mengenai konstituen sosial dan politiknya,. Dengan demikian, perusahaan mengharapkan akan memperoleh image positif dari masyarakat.

2.3.2. Pengakuan dan pengukuran Akuntansi Sosial

2.3.2.1. Metode pengukuran Akuntansi Sosial

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), pengukuran didefenisikan sebagai proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan rugi laba yang menyangkut dasar pengukuran tertentu.

Didalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, ada dampak-dampak yang timbul antara perusahaan dan lingkungannya yang disebut *externalities*. Bila aktivitas-aktivitas perusahaan menyebabkan kenaikan sumber daya sosial maka terjadi *social benefit* atau *eksternal economies* sedangkan jika aktivitas perusahaan itu menyebabkan penurunan sumber daya sosial maka terjadinya *cost benefit* atau *eksternal cost*. Salah satu kesulitan dalam rangka pengembangan akuntansi sosial berhubungan dengan pengukuran *social benefit* dan *social cost*. Hal ini menurut Ramanathan disebabkan karena aktivitas perusahaan yang mempengaruhi kepentingan berbagai kelompok sosial tidak diproses melalui pasar. Karena prosesnya tidak melalui pasar maka tidak ada harga yang pasti untuk menggambarkan nilai pertukaran tersebut. Sehingga transaksi sosial tersebut sangat sulit untuk diidentifikasi dan diukur.

Namun ada beberapa metode yang bisa dipakai dalam pengukuran Akuntansi Sosial (Harahap, 2001: 369) yaitu :

1. menggunakan nilai pengganti

Nilai pengganti digunakan karena *externalities* tidak dapat ditentukan secara langsung. Nilai pengganti adalah nilai dari sesuatu yang diperkirakan mempunyai manfaat sama atau pengorbanan sama dengan sesuatu yang diukur.

2. menggunakan tehnik survey

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari informasi dari masyarakat yang menderita kerugian atau menerima manfaat karena aktivitas perusahaan.

3. menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga

Dengan pendekatan ini, pengukuran tidak dilakukan oleh perusahaan tetapi dilakukan oleh pihak luar (pihak ketiga) yang independen.

4. kerugian masyarakat menggunakan hubungan antara kerugian massal dengan permintaan untuk barang perorangan dalam menghitung

American Accounting Association dalam laporan *Committee on social cost* (Matthews dan Ferera, 1996) menyatakan ada tiga tingkatan pengukuran yang berkaitan dengan perkembangan akuntansi sosial, yaitu: mengidentifikasi dan mendiskripsikan aktivitas, pengukuran aktivitas dengan menggunakan unit non moneter serta penilaian aktivitas dengan taksiran financial.

2.3.2.2. Identifikasi *Social Benefit* dan *Social Cost*

Freedman (1989) memberikan cara untuk mengidentifikasi social benefit dan social cost yaitu dengan menggunakan proses produksi dan distribusi perusahaan sebagai dasar pengidentifikasian. Dengan dasar tersebut, perusahaan dapat menentukan efek samping dan menterjemahkannya dalam item-item yang relevan. Linowes (Freedman, 1989) menyebutkan kategori keterlibatan sosial berkaitan dengan (1) manusia; (2) produk; (3) lingkungan.

Menurut Purwono (2000) suatu aktivitas yang berdampak pada lingkungan akan diklasifikasikan sebagai *social benefit* apabila aktivitas tersebut memperbaiki keadaan lingkungan dan mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi. Sedangkan suatu aktivitas akan dikategorikan sebagai *social cost* apabila aktivitas tersebut menimbulkan kerusakan atau menambah kerusakan lingkungan yang terjadi.

2.3.2.3. Pengukuran item-item yang relevan

Setelah *social benefit* dan *social cost* perusahaan dapat diidentifikasi, maka proses selanjutnya adalah mengukur item- item yang relevan. Ansry Zulfikar (1987) dalam Ahmad Soonhaji (1989) memberikan beberapa teknik pengukuran yang dapat dipakai, antara lain;

1. Penilaian pengganti, yaitu jika nilai dari sesuatu tidak dapat langsung ditentukan, maka dapat mengestimasiannya dengan nilai penggantian.
2. Tehnik Survey, yaitu mencakup cara-cara untuk mendapatkan informasi dari kelompok masyarakat tentang pengukuran aktivitas sosial perusahaan
3. Biaya perbaikan dan pencegahan, yaitu biaya-biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan lingkungan sosialnya.
4. Penilaian dari penilai independent, yaitu memberikan suatu wewenang kepada pihak luar untuk mengukur aktifitas sosial perusahaan.
5. Putusan pengadilan, yaitu dengan suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum.

2.3.2.4. Pengukuran dalam satuan uang

Pengukuran dalam satuan uang untuk *eksternalities* (*Social benefit*) biasanya menggunakan nilai moneter dimana perusahaan tersebut berdiri. Di dalam praktek, input (*cost*) lebih mudah ditentukan dalam unit moneter sebesar *cost* yang telah dikeluarkan oleh perusahaan sedangkan output yang berupa benefit sulit ditentukan jumlahnya karena bersifat *intangibile*. Misalnya dalam kasus pencemaran, *sosial cost* dapat ditentukan dari jumlah unit uang yang dikeluarkan untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat. Sedangkan *social benefit* ditentukan dari meningkatnya produktivitas masyarakat jika perusahaan menanggulangi pencemaran tersebut. Adanya kesulitan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk tetap dilakukan kuantifikasi atau pengukuran dampak aktivitas perusahaan dengan menggunakan unit moneter.

2.3. 4 Pelaporan eksternalities

Menurut Belkoui (1985) yang dikutip oleh Harahap (1993), pelaporan dalam akuntansi sosial berarti memuat informasi menyangkut dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan. Selama ini belum ada bentuk baku mengenai isi dan bentuk untuk melaporkan aktivitas sosial perusahaan. Ada yang melaporkan pertanggungjawaban sosialnya dalam laporan tahunan, dan ada yang mempublikasikan informasi tersebut dalam laporan yang terpisah dari laporan keuangan.

Pelaporan kinerja Sosial merupakan wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat melalui pengungkapan sosial dengan

memanfaatkan berbagai media antara lain laporan tahunan, laporan interim, prospectus, pengumuman terhadap bursa efek ataupun melalui media massa. Penelitian yang dilakukan oleh Heny dan Murtanto (2001) menunjukkan bahwa pelaporan kinerja sosial diungkapkan paling banyak ditemui pada bagian catatan atas laporan keuangan dan tipe pengungkapan yang paling banyak digunakan adalah tipe naratif kuantitatif.

Di Negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, Inggris, Australia dan Jepang, pelaporan ini sudah merupakan hal yang lazim. Estes (1976) dalam Achmad Sondhaji (1989) menggambarkan Praktek pelaporan Akuntansi Sosial yang terdiri dari:

1. Praktek yang sederhana, yaitu laporan terdiri dari uraian akuntansi sosial yang tidak disertai dengan data kuantitatif, baik satuan uang maupun satuan lainnya.
2. Praktek yang lebih maju, yaitu laporan terdiri dari uraian akuntansi sosial dan disertai dengan data kuantitatif.
3. Praktek yang paling maju, yaitu laporan dalam bentuk kualitatif, perusahaan juga menyusun laporannya dalam bentuk neraca.

2.3.4.1. Model Alternatif Pelaporan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Menurut Dilley dan Weygandt ada 4 pendekatan yang dapat dipakai oleh perusahaan didalam melaporkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban sosial sesuai dengan kondisi-kondisi perusahaan yaitu :

1. *Inventory Approach* ; perusahaan mengompilasikan dan mengungkapkan sebuah daftar yang komprehensif dari aktivitas-aktivitas sosial perusahaan.

Daftar ini harus memuat semua aktivitas sosial perusahaan baik yang bersifat positif maupun negatif. Pengungkapan dalam satuan moneter dilakukan apabila data tersedia.

2. *Outlay Cost Approach* atau *Cost Approach*; Perusahaan membuat daftar aktivitas-aktivitas sosial perusahaan dan mengungkapkan jumlah pengeluaran pada masing-masing aktivitas tersebut.
3. *Cost-Benefit Approach*; Perusahaan mengungkapkan aktivitas yang mempunyai dampak sosial berupa biaya dan manfaat dari aktivitas tersebut.
4. *Program Management Approach*; Perusahaan tidak hanya mengungkapkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban sosial tetapi juga tujuan dari aktivitas tersebut serta hasil yang telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan itu.

Ada satu lagi pendekatan menurut Parker, Ferris, dan Otley yaitu *Goal Accounting Approach*, dimana pendekatan ini merupakan variasi model Program Management Approach yang mengasumsikan bahwa perusahaan menyusun tujuan operasional, financial dan tujuan sosial.

2.3.4.2. Standar Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

Hingga saat ini, belum ada standar baku yang digunakan sebagai standar dalam membuat laporan pertanggungjawaban sosial. Sehingga standar yang akan digunakan adalah standar seperti dalam akuntansi keuangan konvensional. Ada empat karakteristik kualitatif pokok yang membuat informasi dalam laporan

keuangan berguna bagi pemakai, yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Karakteristik kualitatif yang pertama adalah dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

Karakteristik kualitatif yang kedua adalah relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Karakteristik kualitatif yang ketiga adalah materialitas. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*).

Karakteristik kualitatif yang keempat adalah keandalan. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan

pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

2.3.4.3. Teknik Pelaporan Akuntansi Sosial

Ada beberapa teknik pelaporan akuntansi sosial ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Diller (1970) dalam Harahap (2001), yaitu :

1. Pengungkapan dalam surat kepada pemegang saham baik dalam laporan tahunan atau bentuk laporan tahunan lainnya.
2. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan
3. Dibuat dalam perkiraan tambahan misalnya melalui adanya perkiraan (akun) penyisihan kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya.

2.4. Pelaporan keuangan

Laporan keuangan menurut SFAC no. 1 digunakan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan, sedangkan SFAC no. 2 mensyaratkan laporan keuangan harus memenuhi kualitas *usefulness*. Untuk memenuhi kualitas *usefulness* tersebut diperlukan banyak informasi sesuai dengan kebutuhan pemakai, sehingga diterbitkan SFAC no. 5 tentang laporan keuangan dan pelaporan keuangan.

2.4.1. Tujuan Pelaporan Keuangan dalam Rerangka Acuan Konseptual

Tujuan pelaporan keuangan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu rerangka acuan konseptual maupun dalam standar akuntansi. FASB menempatkan tujuan pelaporan keuangan sebagai urutan yang pertama dalam

conceptual framework. Tujuan pelaporan keuangan yang telah ditetapkan akan mempengaruhi unsur-unsur lain dalam *conceptual framework*. Tujuan pelaporan keuangan juga akan terimplikasi ke dalam standar akuntansi dan secara tidak langsung akan mempengaruhi praktik akuntansi.

Tujuan pelaporan keuangan mempunyai pengertian yang lebih luas dalam menggambarkan fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan. Akuntansi merupakan suatu aktivitas menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dengan informasi keuangan tersebut. Akuntansi akan bermanfaat bila dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan variabel-variabel ekonomi dan sosial dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu (Suwardjono.1989.3), Oleh karena itu perlu diidentifikasi *variable – variable* lingkungan seperti informasi tentang apa, siapa yang memerlukan informasi dan untuk pengambilan keputusan apa informasi tersebut diperlukan. Setelah variabel- variabel tersebut dapat diidentifikasi maka dapat ditentukan tujuan pelaporan keuangan yang ingin dicapai yang menjadi pengaruh dalam proses pemikiran dan pemilihan konsep – konsep yang relevan dengan tujuan tersebut.

2.4.2. Tujuan Pelaporan Keuangan dalam SFAC no. 1

Dalam paragraf ke-28 SFAC no. 1, dijelaskan bahwa tujuan pelaporan keuangan diderivasikan dari kebutuhan informasi para pemakai eksternal yang tidak mempunyai otoritas untuk menyusun informasi keuangan yang diinginkan mengenai suatu perusahaan. Walaupun laporan keuangan mempunyai aspek internal dan eksternal, FASB lebih memfokuskan kepada aspek eksternalnya.

Aspek eksternal yang dituju oleh informasi keuangan adalah pihak investor dan kreditor, yang merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan.

Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan pemakai lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit dan keputusan lainnya secara rasional. Laporan keuangan juga harus mampu menyediakan informasi mengenai sumber-sumber ekonomi perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut dan efek transaksi, kejadian atau keadaan yang menyebabkan perubahan sumber-sumber tersebut dan klaim terhadapnya.

2.4.3. Tujuan Pelaporan Keuangan dalam SAK 2002

Kerangka Dasar penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) yang terdapat dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2002 menyatakan tujuan pelaporan keuangan dengan kata “tujuan laporan keuangan” sebagai berikut :

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan

pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian, agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi.

2.4.4. Pertimbangan Aspek Sosial ke dalam Tujuan Pelaporan Keuangan

Penetapan tujuan pelaporan keuangan dalam suatu proses perekayasaan akuntansi harus memperhatikan apa yang menjadi tujuan sosial ekonomi dari suatu negara tempat akuntansi tersebut diterapkan. Setiap pelaku ekonomi mempunyai tanggung jawab terhadap tujuan sosial ekonomi nasional. Jika tanggung jawab sosial ini merupakan tanggung jawab manajemen, maka alat pertanggungjawaban manajemen kepada pihak eksternal harus pula konsisten dengan tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian proses penetapan tujuan pelaporan keuangan harus pula mempertimbangkan tujuan sosial ekonomi.

Aspek sosial tersebut juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan praktik akuntansi, karena tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sisi pertanggungjawaban manajemen kepada pihak eksternal.

2.5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam masyarakat yang berpaham bahwa perusahaan perlu memiliki etika dan tanggung jawab, seperti halnya yang ada di Indonesia, maka Akuntansi Sosial Ekonomi mempunyai peranan yang cukup penting.

Bradshaw mengemukakan ada tiga bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu

1. *Corporate Philanthropy*

Tanggung jawab perusahaan berada sebatas kedermawanan, belum sampai pada tanggung jawabnya. Bentuknya dapat berupa kegiatan amal, sumbangan atau kegiatan lain yang mungkin saja tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

2. *Corporate Responsibility*

Kegiatan pertanggungjawaban yang ada sudah merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan, bisa karena ketentuan UU atau bagian dari kemauan dan kesediaan perusahaan.

3. *Corporate Policy*

Disini tanggung jawab sosial perusahaan sudah merupakan bagian dari kebijakannya.

Persoalan apakah perusahaan perlu mempunyai tanggung jawab sosial atau tidak, masih terus merupakan perdebatan ilmiah. Masing-masing mengemukakan pendapat dukungannya dan mengklaim bahwa idenyalah yang paling benar. Ahmed Belkaoui dalam Harahap (2001) mengemukakan alasan para pendukung agar perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial :

1. Keterlibatan sosial merupakan respon terhadap keinginan dan harapan masyarakat terhadap peranan perusahaan. Dalam jangka panjang hal ini sangat menguntungkan.
2. Keterlibatan sosial mungkin akan mempengaruhi perbaikan lingkungan, masyarakat, yang mungkin akan menurunkan biaya produksi.
3. Meningkatkan nama baik perusahaan, akan menimbulkan simpati langganan, simpati karyawan, investor, dan lain-lain.
4. Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Campur tangan pemerintah cenderung membatasi peran perusahaan, sehingga jika perusahaan memiliki tanggung jawab sosial mungkin dapat menghindari pembatasan kegiatan perusahaan.
5. Dapat menunjukkan respon positif perusahaan terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mendapat simpati masyarakat.
6. Sesuai dengan keinginan para pemegang saham, dalam hal ini publik.
7. Mengurangi tensi kebencian masyarakat kepada perusahaan yang kadang-kadang melakukan kegiatan yang tidak disetujui oleh masyarakat.
8. Membantu kepentingan nasional, seperti konservasi alam, pemeliharaan barang seni budaya, peningkatan pendidikan rakyat, lapangan kerja, dan lain-lain.

Di lain pihak alasan para penentang yang tidak menyetujui konsep tanggung jawab sosial perusahaan ini adalah :

1. Mengalihkan perhatian perusahaan dari tujuan utamanya dalam mencari laba, ini akan menimbulkan pemborosan.

2. Memungkinkan keterlibatan perusahaan terhadap permainan kekuasaan atau politik secara berlebihan yang sebenarnya bukan lapangannya.
3. Dapat menimbulkan lingkungan bisnis yang monitik bukan yang pluralistik.
4. Keterlibatan sosial memerlukan dana dan tenaga yang besar yang tidak dapat dipenuhi oleh dana perusahaan yang terbatas, yang dapat menimbulkan kebangkrutan atau menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan.

Keterlibatan pada kegiatan sosial yang demikian kompleks memerlukan tenaga dan para ahli yang belum tentu dimiliki perusahaan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Ernst & Ernst dalam Henny dan Murtanto (2001) telah melakukan survey terhadap pengungkapan sosial pada laporan tahunan yang dilakukan oleh 500 perusahaan industri terkemuka dari tahun 1971-1978. Dari survey tersebut ditemukan bahwa secara umum jumlah perusahaan – perusahaan yang mengungkapkan informasi sosial serta jumlah informasi yang diungkapkan cenderung meningkat. Sekitar 90 % perusahaan yang ditelitinya pada tahun 1978 telah melakukan pengungkapan sosial.

Andrew *et. al* (dalam Utomo, 2000 : 105) melakukan penelitian terhadap pengungkapan sosial dari 119 perusahaan sampel di Malaysia dan Singapura. Penelitian mereka membuktikan bahwa perusahaan besar lebih banyak melakukan pengungkapan daripada perusahaan menengah dan kecil. Terdapat 50 %

perusahaan besar yang melakukan pengungkapan sosial, sedangkan perusahaan menengah hanya 43 % dan perusahaan kecil 14 %. Tema yang paling banyak diungkap adalah mengenai ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muslim utomo (2000;111-116), terhadap praktik pengungkapan sosial pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia tahun 1998 ditemukan bahwa tema ketenagakerjaan mendapat perhatian yang lebih besar diantara teme-tema lainnya.

Pembuatan laporan prestasi sosial di Indonesia (versi Prospektus dan Bisnis Indonesia) pada 50 perusahaan mengalami kenaikan cukup tinggi, terutama bagi perusahaan yang sudah *go public* dan khususnya bagi perusahaan yang dapat mencemari lingkungan cukup tinggi. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa kesadaran dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sudah cukup tinggi. Mereka menyadari bahwa kepedulian terhadap lingkungan sama pentingnya dengan memproduksi suatu produk.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap laporan tahunan perusahaan-perusahaan sampel edisi tahun 1999, gambaran tentang praktek pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia akan ditunjukkan oleh tabel-tabel berikut ini :

TABEL 2.1

**PERSENTASE PERUSAHAAN *HIGH PROFILE* YANG MELAKUKAN
PENGUNGKAPAN SOSIAL BERDASARKAN TEMA DAN LOKASI
DALAM LAPORAN TAHUNAN (%)**

Tema Pengungkapan	Tipe Pengungkapan		
	Naratif Kualitatif	Kuantitatif	Moneter
Konsumen dan Produk	93.1	44.83	65.52
Lingkungan dan Energi	89.66	3.45	10.34
Mitra Bisnis	93.1	0	100
Pemegang Saham	93.1	100	100
Kemasyarakatan	86.21	3.45	100
Ketenagakerjaan	93.1	100	100

Sumber : Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi

TABEL 2.2

**PERSENTASE PERUSAHAAN *LOW PROFILE* YANG MELAKUKAN
PENGUNGKAPAN SOSIAL BERDASARKAN TEMA DAN TIPE
PENGUNGKAPAN (%)**

Tema Pengungkapan	Tipe Pengungkapan		
	Naratif Kualitatif	Kuantitatif	Moneter
Konsumen dan Produk	100	48.28	51.72
Lingkungan dan Energi	75.86	0	3.45
Mitra Bisnis	96.55	6.9	100
Pemegang Saham	96.55	96.55	100
Kemasyarakatan	72.41	13.79	100
Ketenagakerjaan	100	100	93.1

Sumber : Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informas

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Berdirinya PT Kiho Bali Korin

Secara umum tujuan didirikannya PT. Kiho Bali Korin di Yogyakarta adalah agar dapat memproduksi sarung tangan, khususnya sarung tangan olah raga (Golf) dengan harga yang relatif murah. Karena tersedianya tenaga kerja dan bahan baku yang murah sehingga PT. Kiho Bali Korin dapat menekan biaya produksi dan mampu bersaing di pasar Internasional.

PT. Kiho bali Korin adalah sebuah perusahaan swasta (PMA) yang bergerak dalam bidang industri sarung tangan olah raga (Golf) yang berkedudukan di kawasan timur Yogyakarta. Semula bernama PT. Kiho Budi Korin adalah sebuah perusahaan Joint Venture, yang didirikan pada tanggal 13 September 1990 sesuai Akta Notaris Nomor : 24 dari Notaris Milly Karmila Sareal, SH yaitu antara PT. Budi Progo Perkasa sebuah Perusahaan Penyamaan Kulit di Indonesia yang bernaung dalam PT. Sungai Budi Group P dengan Kiho Product Company Limited sebuah Perusahaan Sarung Tangan terkemuka di Korea Selatan.

Sesuai Akta Notaris No : 19 tanggal 21 Desember 2000 dari Notaris Muchammad Agus Hanafi, SH Saham PT. Budi Progo Perkasa dijual dan dibeli oleh Kiho Product Company limited, sehingga 100 % saham dipegang oleh Kiho Product Company Limited, dan nama PT.Kiho Budi Korin dirubah menjadi PT. Kiho Bali Korin.

Meski banyak kompetitor baik dalam negeri maupun luar negeri, namun PT. Kiho Bali Korin mampu bertahan dan berkembang hingga tahun 2003 jumlah karyawan PT. Kiho Bali Korin dari Indonesia sebanyak 376 orang, yang terdiri dari : 316 orang Perempuan dan 60 orang laki – laki dan tenaga asing dari Korea Selatan 2 orang laki – laki.

3.2. Penentuan Lokasi / Alasan – Alasan Pendirian PT Kiho Bali korin

- a. Kec. Kalasan adalah salah satu daerah di wilayah Kab. Sleman yang jumlah penduduknya cukup besar sehingga banyak tersedia tenaga kerja yang dibutuhkan.
- b. Masih banyak lahan kosong di Kec. Kalasan yang letaknya jauh dari pemukiman penduduk, sehingga cocok dipilih sebagai lokasi industri.
- c. Lokasi industri tersebut dekat dengan Bandar Udara Adi Sucipto.
- d. Tersedianya fasilitas air dan listrik.
- e. Mudah mendapatkan bahan baku dengan harga terjangkau

3.3. Struktur Organisasi PT Kiho Bali Korin

PT Kiho Bali Korin adalah perusahaan yang memproduksi sarung tangan golf yang dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu oleh dua orang manajer, dalam pelaksanaannya tiap-tiap manajer dibantu oleh para staf, sesuai dengan job description tugas-tugas para pimpinan dan staf-staf adalah sebagai berikut:

a. Direktur

perusahaan sesuai dengan garis – garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh rapat persero dan mengkoordinasikan kepada semua bagian dalam melaksanakan operasi perusahaan serta memberikan

Berkewajiban untuk menentukan kebijaksanaan perusahaan dan meninjau laporan pertanggungjawaban kepada dewan komisaris.

b. Kepala Bagian Personalia

Bertanggung jawab atas perekrutan dan pelatihan tenaga kerja, menyelenggarakan absensi, melakukan perhitungan dan pembayaran gaji, serta menjadi jembatan antara sesama karyawan dan perusahaan.

c. Kepala Bagian Accounting

Bertanggung jawab menyelenggarakan segala urusan pembukuan yang berkaitan dengan segala transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dan membuat laporan keuangan secara berkala.

d. Kepala Bagian Ekspor Import

Bertanggung jawab mengurus dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penjualan hasil produksi perusahaan dan pembelian bahan produksi dari luar Indonesia.

e. Kepala Bagian Pembelian

Bertanggung jawab atas pembelian bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi dan barang – barang untuk keperluan perusahaan lainnya.

f. Factory Manager

Bertanggung jawab atas jalannya proses produksi didalam perusahaan secara keseluruhan.

3.4. Visi, Misi dan Strategi Perusahaan

- ❖ Visi Perusahaan
 - Menjadi Perusahaan yang terbaik dalam memproduksi sarung tangan olah raga (Golf) di Indonesia.
- ❖ Misi Perusahaan
 - Menjadi pelopor industri sarung tangan olah raga (golf) di Indonesia yang berbasis pada peningkatan mutu dan SDM.
- ❖ Tujuan Perusahaan
 - Pemerataan pada bidang industrialisasi
 - Membantu dan menciptakan lapangan kerja serta mengatasi pengangguran.
 - Meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitar Perusahaan
 - Menciptakan devisa negara dengan mengekspor hasil produksi.
- ❖ Strategi Perusahaan
 - Market oriented dalam rangka memproduksi sarung tangan olah raga (Golf) yang berkualitas tinggi.
 - Melakukan inovasi baru secara terus menerus terhadap produk yang dihasilkan
 - Bidang keuangan yang mengarah profit oriented.
 - Bidang organisasi dan SDM yang mendukung

3.5. Sumber Daya Manusia Yang Dimiliki Perusahaan

PT. Kiho Bali Korin adalah perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja baik pria maupun wanita, jumlah komposisi anatra pekerja pria dan wanita secara rinci adalah sebagai berikut :

JUMLAH KARYAWAN PT. KIHO BALI KORIN

	2000	2001	2002	2003
Karyawan Pria	290	295	300	316
Karyawan Wanita	54	55	56	60
Jml Karyawan Seluruhnya	344	350	356	376

Perusahaan menganggap karyawan sebagai mitra kerja Perusahaan yang dianggap penting keberadaannya oleh perusahaan karena sangat mendukung kegiatan Perusahaan, maka tidak berlebihan pihak perusahaan perlu memperhatikan asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, yaitu karyawan dengan memperhatikan kesejahteraan yang sewajarnya, untuk itulah sebagai langkah awal pihak perusahaan dan karyawan mengadakan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang diadakan mempunyai maksud menciptakan hubungan yang harmonis, memelihara serta menjalin hubungan ketenagakerjaan yang didasarkan pada Hubungan Industrial Pancasila (H I P).

Tujuan diadakannya (KKB) ini adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan adanya kepastian Hak dan Kewajiban Pengusaha serta karyawan yang dilandasi oleh Hubungan Industrial Pancasila (H I P). Pihak –

pihak yang terlibat keseluruhan proses produksi dalam segala sikap dan tindakannya harus selalu berpegang pada Tri Darma, yaitu :

1. Merasa ikut memiliki (Rumongso melu Handarbeni)
2. Ikut memelihara dan mempertahankan (Melu Hangrungbehi)
3. Dan terus menerus mawas diri (Mulat Sariro Hangroso Wani)

Jumlah Karyawan bekerja pada PT. Kiho Bali Korin sebanyak 376 karyawan dan digolongkan menjadi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap, dengan uraian jumlah karyawan tetap dan karyawan tidak tetap sebagai berikut:

1. Karyawan Tetap (371 Karyawan), yaitu mereka yang telah bekerja melewati masa percobaan dan memenuhi persyaratan lain yang diperlukan serta pernah ditugaskan pada suatu jabatan tertentu. Karyawan tetap terdiri dari :
 - a. Karyawan Bulanan tetap (56 Karyawan)
 - b. Karyawan Harian tetap (315 Karyawan)
2. Karyawan Tidak Tetap (5 Karyawan), yaitu :

Karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk tenggang waktu tertentu. Karyawan tidak tetap terdiri dari :

 - a. Karyawan Bulanan tidak tetap (4 Karyawan)
 - b. Karyawan Harian tidak tetap (1 Karyawan)

Penerimaan karyawan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, dimana penerimaan karyawan yang baru, adanya formasi, tingkat pendidikan calon karyawan dan pengalaman bila diperlukan disesuaikan dengan formasi yang diperlukan.

c. Jam Kerja PT Kiho Bali Korin

PT Kiho Bali Korin dalam menjalankan aktivitas perusahaan menggunakan waktu kerja sebagai berikut :

Waktu kerja :

- Senin s/d Jum'at : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB
- Sabtu : 08.00 WIB s/d 13.00 WIB

Waktu Istirahat :

- Senin s/d Kamis : 12.00 WIB s/d 13.00 WIB
- Jum'at : 11.45 WIB s.d 12.45 WIB
- Sabtu : Tanpa Istirahat

d. Macam – macam tunjangan yang diberikan kepada karyawan adalah :

1. Tunjangan Beras

- Rp. 20.000 : Bujang
- Rp. 24.000 : Keluarga belum punya anak
- Rp. 28.000 : Keluarga punya anak

2. Tunjangan Kerajinan (Absensi)

Rp. 4.000 diberikan apabila karyawan dalam 1 bulan masuk kerja terus tanpa ada absen.

3. Tunjangan Prestasi kerja

Rp. 3.000 – Rp, 20.000 diberikan apabila karyawan mempunyai prestasi baik, kreterianya adalah : loyal, tanggung jawab, dedikasi, disiplin dan hasil kerja.

4. Tunjangan Bonus

Diberikan apabila tiap Bagian telah mencapai target produksi yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Rangking 1 : Rp. 150.000

Rangking 2 : Rp. 100.000

Rangking 3 : Rp. 50.000

5. Tunjangan Perjalanan Dinas

Diberikan kepada karyawan yang melakukan perjalanan dinas ke luar kota.

6. Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Pemberiannya 1 tahun sekali, yaitu pada saat Hari Raya Idul Fitri dengan keterangan sebagai berikut :

a. Masa kerja 3 bulan – 1 tahun : Proporsional

b. Masa kerja 1 tahun – 3 tahun : 100 % (1 kali gaji)

c. Masa kerja 3 tahun – 6 tahun : 110 %

d. Masa kerja 6 tahun ke atas : 120 %

e. Jenis – jenis cuti yang diberikan perusahaan adalah :

1. Cuti tahunan :

Diberikan kepada karyawan yang telah bekerja 1 tahun terus menerus.

2. Cuti Hamil :

Diberikan kepada karyawan wanita yang melahirkan dengan ketentuan 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah

melahirkan dengan penetapan mulainya cuti hamil berdasarkan surat Keterangan Dokter.

3. Cuti Haid :

Diberikan kepada karyawan wanita untuk tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan ke dua waktu haid. Dalam pelaksanaannya karyawan wanita tetap wajib memberitahukan secara tertulis akan halnya kepada Atasannya.

4. Cuti menjalankan ibadah agama :

Diberikan apabila karyawan telah bekerja selama 3 tahun secara terus menerus sesuai dengan Peraturan RI No 8 / 1981 dalam hal menunaikan Ibadah Haji dengan tetap mendapatkan upah / gaji.

F. Jenis – jenis Sumbangan / Bantuan yang diberikan Perusahaan kepada karyawan :

1. Sumbangan pernikahan

Diberikan kepada karyawan yang melaksanakan pernikahan pertama sebesar Rp. 30.000 dengan menyerahkan syarat – syarat yang harus dilengkapi .

2. Sumbangan Melahirkan

Diberikan kepada karyawan yang telah melahirkan sebesar Rp. 150.000 untuk Anak pertama sampai ke tiga dengan syarat Anak dari perkawinan yang syah.

3. Sumbangan Duka

Diberikan kepada karyawan apabila ada anggota keluarga karyawan yang meninggal dunia misal : Orang Tua, Mertua, Anak, Suami, Istri sebesar Rp. 300.000.

g. Sistem Pembayaran Gaji

1. Pembayaran Gaji diberikan oleh Perusahaan

- a. Tanggal 15 dan akhir bulan untuk karyawan Harian Tetap dan karyawan Harian Tidak Tetap.
- b. Akhir Bulan untuk karyawan Tetap.

2. Kenaikan Gaji secara berkala dilakukan setiap 1 tahun sekali dengan pertimbangan tertentu dan tetap mengingat kemampuan perusahaan.

3. Pajak penghasilan atas Gaji dan pendapatan karyawan lainnya menjadi tanggungan perusahaan.

4. Pemotongan gaji karyawan dilakukan atas dasar permintaan karyawan secara tertulis, untuk :

- a. Pembayaran bagi koperasi karyawan.
- b. Hutang perusahaan, denda / ganti rugi, kelebihan / salah bayar, dan potongan lain – lainnya.

h. Fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan kepada karyawan adalah :

1. Rekreasi / picnic 1 kali dalam 1 tahun produksi, untuk memperlerat hubungan kekeluargaan antara perusahaan, sesama karyawan dan keluarganya.

2. Koperasi karyawan

Dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan karyawan, perusahaan menyediakan fasilitas dan bantuan dana kepada koperasi sehingga koperasi tersebut dapat lebih berkembang.

3. Fasilitas Mushalla

Dalam rangka mempermudah karyawan dalam melaksanakan sholat perusahaan menyediakan fasilitas Mushalla.

4. Fasilitas Ruang Makan

Dalam rangka memudahkan karyawan makan di sela jam istirahat perusahaan menyediakan tempat ruang makan.

5. Fasilitas Parkir

Dalam rangka memudahkan karyawan menempatkan kendaraan atau transportasi yang di bawa perusahaan memberikan fasilitas tempat parkir.

I. Uang Pesangon yang diberikan perusahaan kepada karyawan sesuai dengan Undang – undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 :

- Perhitungan uang pesangon sebagai berikut :
 - a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah,
 - b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah,
 - c. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah,

- d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah,
 - e. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah.
 - f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah,
 - g. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah,
 - h. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah,
 - i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
2. Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagai berikut :
- a. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah,
 - b. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah,
 - c. Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah,
 - d. Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah,
 - e. Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah,

- f. Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
 - g. Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh satu) tahun, 8 (delapan) bulan upah.
 - h. Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.
3. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagai berikut :
- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur,
 - b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja / buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja / buruh diterima bekerja,
 - c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan / atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat,
 - d. Hal – hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

3.6. Proses Produksi dan Produk Yang Dihasilkan PT Kiho Bali Korin

a. Bahan baku dan Bahan penolong

Perusahaan dalam menyediakan bahan baku untuk memproduksi sarung tangan golf, bahan bakunya didapatkan dari dalam wilayah propinsi DIY, hal ini dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menganggap bahan baku yang diperlukan mudah didapat dan untuk memberdayakan dan memajukan

industri kulit di Yogyakarta, bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi sarung tangan golf adalah:

1. Kulit
2. Syntetic

Bahan penolong juga didapangkan dari daerah Yogyakarta dengan pengawasan standar mutu dan pemilihan bahan-bahan yang berkualitas sesuai standar Internasional dan diawasi oleh manajer factory yang dibantu oleh staf yang berpengalaman dari Korea, bahan Penolong yang digunakan untuk memproduksi sarung tangan golf adalah:

1. Ballmaker
2. Logo
3. PU Tape
4. Elastic Band

b. Proses Produksi

Tahapan proses produksi PT Kiho Bali Korin adalah :

- Tahap pemotongan pola (Cutting)

Adalah tahap dimana kulit atau syntetic dipotong menurut pola yang telah ditentukan atau distandarisasi oleh perusahaan.

- Tahap penjahitan (Sewing)

Adalah tahap dimana pola – pola yang telah jadi setelah melalui tahap pemotongan (Cutting) pola dijahit untuk membentuk sarung tangan sesuai pesanan atau menurut permintaan pemesan (Buyer).

- Tahap penyelesaian (Finishing)

Adalah tahap dimana sarung tangan yang sudah jadi setelah dijahit diperiksa (Inspection) untuk ditentukan apakah sarung tangan tersebut memenuhi syarat atau tidak. Dan sarung tangan yang telah memenuhi syarat dimasukkan dalam envelope, lalu dilanjutkan kedalam pengepakan (Packing). Dan barang siap untuk dikirim (Eksport).

c. Hasil Produksi dan Pemasaran

PT. Kiho Bali Korin adalah suatu perusahaan yang memproduksi sarung tangan olah raga (Golf). Dalam menembus pasaran Dunia hasil produksi PT. Kiho Bali Korin adalah 100 % Eksport dengan negara tujuan yaitu : USA, Kanada, dan Australia.

3.7. Utilities

Untuk menciptakan atau meningkatkan kesehatan dan kenyamanan kerja perusahaan, maka pihak perusahaan menyediakan berbagai sarana yang dapat membantu karyawan baik dalam proses kelancaran proses produksi juga smata-mata diadakan agar terciptanya susana yang kondusif dan nyaman dalam lingkungan perusahaan. Berbagai saran yang disediakan perusahaan antara lain :

a. Unit pengadaan air bersih

Untuk keperluan minuman air diambil dari sumur dangkal dengan kedalaman \pm 15 Meter. Sumur ini dapat langsung didistribusikan tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.

b. Pengadaan alat pemadam kebakaran

Alat – alat pemadam kebakaran terpasang pada tiap – tiap bagian di dalam produksi, kantor dan post satpam.

c. Unit pengadaan listrik

Disamping Sumber Tenaga Listrik dari PLN Perusahaan menyediakan Generator (Genzet) sebagai sumber tenaga listrik cadangan bila terjadi gangguan.

d. Pengadaan tenaga lain

PT Kiho juga menyediakan berbagai saran dan program kesehatan dan keselamatan kerja dengan melakukan kerjasama dengan beberapa Rumah Sakit di Yogyakarta, serta dengan menyediakan fasilitas keselamatan kerja antara lain :

1. Rumah sakit, perusahaan menjalin kerja sama dengan RS Panti Rini, Rumah Sakit Umum Daerah, RS PKU Muhammadiyah.
2. Penyediaan obat – obatan, sebagai pertolongan pertama apabila ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja.
3. Penyediaan petugas K3, sebagai petugas pengantar ke RS atau pulang ke rumah apabila ada karyawan sakit.
4. Peralatan pengaman kerja, berupa :
Masker, sepatu tahan air, sarung tangan dan kaca mata las yang digunakan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan
5. Pengolahan sampah terdiri dari bak sampah di dalam dan di luar ruangan serta ada petugas yang mengelola sampah.

6. Fasilitas lain, berupa pakaian kerja 2 stel setiap tahun , sepatu, topi, ikat pinggang, pakaian khusus pada bagian khusus dan koperasi karyawan.

3.8. Partisipasi Perusahaan Terhadap Masyarakat, Lingkungan Hidup dan Program Pemerintah.

Di dalam membina hubungan yang baik antara pihak perusahaan dengan lingkungan masyarakat PT. Kiho Bali Korin memberikan bantuan berupa pemberian berbagai macam sumbangan kepada masyarakat sekitar baik dalam bentuk bantuan dana maupun fisik seperti:

- a. Pemberian sumbangan dana bagi pembangunan tempat ibadah
- b. Berbagai jenis bantuan sosial kemasyarakatan lainnya, seperti sumbangan 17 Agustusan dan sumbangan lainnya.
- c. Pembangunan jalan di sekitar perusahaan.
- d. Pengolahan sampah, sampah di PT. Kiho Bali Korin berbentuk padat dikelola oleh petugas bagian PU di taruh di bak sampah dan di buang di TPA.
- e. Pemeriksaan air bersih, kebisingan dan kadar debu lingkungan perusahaan, terutama di lokasi pabrik dengan melakukan kerja sama dengan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan di bawah pengawasan Departemen Kesehatan RI.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Pertanggungjawaban Sosial PT Kiho Bali Korin

Laporan pertanggungjawaban sosial merupakan media untuk memenuhi tanggungjawab sosial perusahaan kepada pihak pemerintah dan masyarakat luas. Dengan adanya pelaporan pertanggungjawaban sosial akan membantu meningkatkan nama baik dan citra perusahaan serta akan menimbulkan simpati dari berbagai pihak

Tanggung jawab sosial PT Kiho Bali Korin terhadap karyawan ditunjukkan dengan adanya penyediaan berbagai macam fasilitas dan kegiatan yang dilaksanakan perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosialnya. Fasilitas yang disediakan perusahaan misalnya; pemberian tunjangan, pemberian cuti, pemberian sumbangan terhadap karyawan, sarana transportasi dan sarana olah raga, sedangkan kegiatan yang dilakukan perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosialnya antara lain adalah adanya pemberian penghargaan khusus kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selain itu juga untuk menciptakan kesehatan dan kenyamanan kerja perusahaan menyediakan berbagai sarana yang mendukung, perusahaan juga telah melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Panti rapih, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah.

Bagi masyarakat yang berada di lingkungan PT Kiho, perusahaan mewujudkan tanggung jawab sosialnya dengan memberikan sumbangan dan bantuan

kepada masyarakat yang berupa pembangunan sarana transportasi, berbagai jenis bantuan sosial kemasyarakatan lainnya, seperti sumbangan agustusan dan berbagai macam sumbangan yang diberikan kepada masyarakat apabila ada kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilingkungan PT Kiho, pemberian sumbangan dana bagi pembangunan tempat ibadah

Tanggung jawab sosial terhadap pemerintah dilakukan dengan memberikan sumbangan dan bantuan berupa pembayaran iuran dan retribusi yang akan digunakan untuk kepentingan umum, perusahaan juga menanggung pajak penghasilan atas gaji dan pendapatan karyawan yang dibayarkan kepada pemerintah.

PT Kiho Bali Korin telah memenuhi tanggungjawab sosialnya dengan melaksanakan berbagai kegiatan dan program-program sosial yang dapat dikategorikan dalam empat bidang. Berikut ini akan diuraikan pertanggungjawab sosial yang telah dilakukan oleh PT Kiho Bali Korin yang dapat dikategorikan kedalam empat bidang, yaitu:

1. Lingkungan

Dalam bidang lingkungan, perusahaan telah melaksanakan program pengolahan sampah, karena limbah yang dihasilkan oleh PT Kiho berbentuk padat dan tidak membahayakan lingkungan, pengolahan masalah sampah ini cukup dikelola oleh petugas bagian PU yang kemudian ditempatkan di bak sampah dan dibuang di TPA. Program lainnya adalah program pemeriksaan air bersih, program pemeriksaan kebisingan dan kadar debu di lingkungan perusahaan dengan

melakukan kerja sama dengan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan di bawah pengawasan Departemen Kesehatan RI.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam bidang ini Perusahaan menyediakan berbagai fasilitas bagi karyawan yang berupa sarana kesehatan dengan melakukan kerja sama dengan beberapa Rumah Sakit yang dekat dengan lokasi perusahaan, sarana ibadah dan sarana olah raga. Selain itu dengan pemberian berbagai macam tunjangan dan penghargaan kerja sesuai dengan kebijakan perusahaan. Perusahaan juga menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan oleh karyawan untuk menambah kenyamanan karyawan dalam menjalankan rutinitasnya.

3. Kepedulian terhadap Keterlibatan Masyarakat dan Pemerintah

Dalam bidang ini perusahaan banyak melakukan rekrutment para pekerjanya sekitar 97% merupakan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat disekitar perusahaan, karena perusahaan bertujuan membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta mengatasi masalah pengangguran, selain itu juga perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk disekitar perusahaan. Perusahaan juga mengadakan program koproresi yang beranggotakan karyawan perusahaan, dimana karyawan perusahaan sebagian besar adalah masyarakat sekitar. Wujud lain dari tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberikan bantuan dan sumbangan pada masyarakat baik itu sumbangan dan bantuan berupa bantuan fisik maupun materi.

4. Bidang Produk

Dalam bidang ini, perusahaan mengembangkan produk sarung tangan golf yang berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari produk unggulan yang dihasilkan oleh perusahaan yang 100% orientasi ekspor dengan negara tujuan yaitu USA, Kanada dan Australia. Perusahaan juga selalu melakukan inovasi secara terus menerus terhadap produk yang dihasilkan, produk sarung tangan golf PT Kohi selalu diawasi secara ketat oleh tenaga ahli dari Korea, hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas agar tetap baik dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas dan mutu produk jadi yang sesuai dengan standar Internasional.

Dari hasil penelitian terhadap data-data yang diperoleh di PT Kiho, dapat diketahui bahwa PT Kiho telah melaksanakan tanggungjawab sosialnya baik itu kepada karyawan, masyarakat umum, pemerintah, produk maupun lingkungan. Perusahaan tidak hanya memandang laba sebagai satu-satunya tujuan dari perusahaan tapi ada tujuan lainnya yang dianggap penting oleh PT Kiho, hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan, baik itu yang menyangkut masalah yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan, masyarakat umum, lingkungan, produk serta lingkungan masyarakat sekitar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh perusahaan.

Berbagai program dan aktivitas sosial diatas merupakan bukti nyata bahwa PT Kiho peduli terhadap lingkungan sosialnya. Semua hal tersebut diatas akan sangat bermanfaat bagi perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. perusahaan akan mendapatkan dampak positif dengan melaksanakan tanggung jawab sosialnya,

karena itu sudah seharusnya perusahaan melaporkan program dan kegiatan sosialnya agar semua pihak dapat mengetahui apa yang telah dilakukan perusahaan sehubungan dengan kepeduliannya terhadap lingkungan sosialnya.

4.2. Pentingnya Laporan Pertanggungjawaban Sosial Bagi PT Kiho Bali Korin

PT Kiho Bali Korin merasa perlu untuk mengungkapkan laporan pertanggungjawaban sosialnya kepada masyarakat luas dan pemerintah untuk menunjukkan bahwa PT Kiho Bali Korin dalam menjalankan aktivitas produksinya peduli dengan masalah kelestarian lingkungan. Hal ini ditunjukkan oleh PT Kiho dengan program pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh PT Kiho, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan PU. PT Kiho melakukan program pemeriksaan terhadap tingkat kebisingan pabrik dan kadar debu dengan melakukan kerjasama dengan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan yang berada dibawah pengawasan Departemen Kesehatan RI.

Adanya kepedulian PT Kiho terhadap lingkungannya, dan apabila semua kegiatan tersebut dilaporkan melalui pelaporan pertanggungjawaban sosial dapat membangun citra dan nama baik PT Kiho dalam pandangan masyarakat luas, pemerintah, konsumen dan seluruh element yang terkait dan mempunyai kepentingan terhadap PT Kiho, dengan menunjukkan bahwa PT Kiho benar-benar peduli terhadap masalah kelestarian lingkungan dan hal tersebut ditangani secara sungguh-sungguh oleh PT Kiho Bali Korin, yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi PT Kiho sendiri juga sekaligus dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Pentingnya melaporkan pertanggungjawaban sosial ini juga dirasakan akan membawa manfaat yang besar bagi PT Kiho, hal ini untuk menunjukkan kepedulian PT Kiho Bali Korin terhadap masyarakat sekitar, konsumen, pemerintah, hal ini sesuai dengan tujuan PT Kiho yaitu membantu dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berdomisili disekitar PT Kiho, ini diwujudkan dengan kebijakan PT Kiho yang mempekerjakan kurang lebih 300 orang karyawan yang berasal dari masyarakat disekitar PT Kiho berada. Tujuan lain dari PT Kiho yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar hal ini ditunjukkan oleh PT Kiho dengan pemberian berbagai macam sumbangan terhadap berbagai kegiatan kemasyarakatan, pemberian bantuan pembangunan tempat ibadah dan pemberian bantuan pembangunan sarana transportasi. Perusahaan juga membantu menambah devisa bagi negara.

Laporan pertanggungjawaban sosial ini oleh PT Kiho dianggap dapat meningkatkan nama baik perusahaan yang akan menimbulkan simpati dari langganan, karyawan, masyarakat sekitar dan pemerintah dengan menunjukkan bahwa PT Kiho dalam menjalankan operasinya selalu berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga PT Kiho tidak hanya mementingkan motif bisnisnya saja, tetapi sangat memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat.

Pelaporan pertanggungjawaban sosial PT Kiho terhadap karyawan juga diharapkan akan semakin menambah kepercayaan karyawan kepada perusahaan, sehingga hal ini nantinya diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonisantra PT Kiho dengan karyawan yang pada akhirnya karyawan diharapkan

merasa ikut memiliki, rasa ikut memelihara dan mempertahankan keberadaan perusahaan, sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan etos kerja dan produktivitas karyawan yang dapat meningkatkan kualitas produk dan kuantitas produk. Semua hal yang telah disebutkan diatas akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan perusahaan maupun karyawan.

PT Kiho dalm mewujudkan kondisi dan situasi kerja yang mendukung dan nyaman perusahaan merasa perlu untuk melaporkan berbagai aktivitas dan kebijakan PT Kiho terhadap pekerjanya, hal ini ditunjukkan oleh PT Kiho dengan adanya penyediaan berbagai fasilitas bagi karyawan seperti pengadaan sarana kesehatan, sarana kesehatan kerja, pemberian tunjangan, penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi. Berbagai kebijakan PT Kiho semata-mata dijalankan untuk menciptakan kenyamanan dan kesehatan kerja. PT Kiho menyadari apabila berbagai kebijakan perusahaan terhadap karyawan yang menyangkut tanggungjawab sosialm PT Kiho diungkapkan melalui laporan pertanggungjawaban sosial dapat membantu membangun nama baik perusahaan, selain itu juga sebagai media sosialisasi kebijakan tanggungjawab sosial perusahaan kepada karyawannya dan masyarakat luas umumnya.

Semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh PT Kiho Bali Korin secara suka rela, hal ini dapat meningkatkan kredibilitas manajemen PT Kiho, pemahaman para analis terhadap perusahaan, menambah kepercayaan investor serta meningkatkan nilai saham secara potensial, sehingga dapat menjembatani dan meminimalisir permasalahan sosial yang mungkin timbul pada PT Kiho Bali Korin.

PT Kiho Bali Korin menyadari betapa dunia usaha saat ini sangat rentan dengan berbagai masalah sosial. Beberapa kasus seperti: maraknya aksi demo buruh, penjarahan gudang, perusakan gedung kantor pabrik, dan penggarapan lahan perusahaan oleh masyarakat karena masyarakat meyakini bahwa hak-hak rakyat telah dirampas oleh perusahaan yang terjadi di berbagai daerah, semakin menguatkan fakta tentang stabilitas sosial yang tidak kondusif sehingga hal tersebut membuat PT Kiho Bali Korin semakin mengetahui betapa pentingnya adanya suatu bentuk pembinaan hubungan yang baik antara perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan PT Kiho Bali Korin baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berbagai contoh masalah-masalah diatas menuntut PT Kiho Bali Korin untuk mampu mengakses kepentingan lingkungan sosialnya yang diikuti dengan pengungkapan dan pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga melahirkan sebuah laporan yang mendeskripsikan segala aspek yang dapat mendukung kelangsungan hidup sebuah entitas. Disinilah peran Akuntansi sosial diharapkan dapat merespon lingkungan sosialnya sebagai perwujudan kepekaan dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan.

PT Kiho Bali Korin merasa perlu untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya demi kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Perdagangan bebas maupun domestik yang mensyaratkan produk yang harus bersahabat dengan lingkungan, memaksa perusahaan harus menyusun strategi bisnis secara menyeluruh. PT Kiho Bali Korin menyadari bahwa masyarakat luas tidak lagi membatasiuntutannya atas terpenuhinya barang dan jasa serta kesempatan kerja saja, tetapi juga

agar perusahaan mempertimbangkan dan mempertanggungjawabkan masalah lingkungan dan kemanusiaan dalam setiap operasinya. Semua aspek tersebut tidak boleh dipandang remeh bila perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.

PT Kiho Bali Korin tidak hanya memandang laba sebagai satu-satunya tujuan dari perusahaan tapi ada tujuan yang lainnya yang dianggap penting oleh perusahaan, Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan – kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan, baik itu yang menyangkut masalah yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan, masyarakat umum, lingkungan, produk serta lingkungan masyarakat sekitar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan perusahaan.

Berdasarkan dari besarnya manfaat yang akan diperoleh oleh perusahaan, apabila *perusahaan* menerapkan laporan pertanggungjawaban sosial, perusahaan merasa perlu untuk membuat pelaporan pertanggungjawaban sosial, walaupun pada saat penelitian ini dilakukan PT Kiho belum melaporkan pertanggungjawaban sosialnya yang telah dilakukan.

4.3. Manfaat bagi PT Kiho Bali Korin bila Menerapkan laporan Pertanggungjawaban Sosial

PT Kiho Bali Korin merasa bahwa apabila semakin banyak informasi tentang pertanggungjawaban social, baik itu mengenai aktivitas yang berhubungan dengan tema kemasyarakatan, lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan, melalui media laporan pertanggungjawaban social oleh PT Kiho Bali Korin secara suka rela diharapkan

dapat meningkatkan kredibilitas manajemen PT Kiho, menambah pemahaman para analis terhadap PT Kiho, menambah kepercayaan para investor, serta dapat meningkatkan nilai saham PT Kiho secara potensial.

Melalui laporan pertanggungjawaban social bagi PT Kiho Bali Korin merupakan suatu langkah positif yang ditempuh PT Kiho, sebagai wujud kepedulian PT Kiho Bali Korin terhadap berbagai masalah social dan lingkungan, PT Kiho merasa perlu dimasa mendatang untuk membuat laporan pertanggungjawaban social, karena menurut manajemen PT Kiho hal ini dapat mendatangkan keuntungan yang lebih banyak bagi PT Kiho Bali Korin dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban social.

Laporan pertanggungjawaban social bagi PT Kiho Bali Korin akan semakin menambah kepercayaan pihak-pihak yang terkait dengan PT Kiho Bali Korin seperti kreditor, investor, pemerintah dan masyarakat secara luas, karena dengan laporan pertanggungjawaban social ini dapat dijadikan sarana evaluasi terhadap kinerja social PT Kiho Bali Korin dan juga menyediakan informasi yang relevan dan transparan tentang kepedulian PT Kiho Bali Korin terhadap lingkungan dan masalah-masalah social yang terjadi. Pihak-pihak yang berada diluar PT Kiho Bali Korin juga akan dapat mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh PT Kiho Bali Korin sehubungan dengan tanggungjawab sosialnya.

Manfaat lain yang akan dapat diperoleh PT Kiho Bali Korin adalah terhindarnya PT Kiho Bali Korin dari political cost yang mungkin terjadi, yaitu berbagai biaya yang mungkin harus ditanggung oleh PT Kiho Bali Korin karena

adanya lobi kelompok tertentu kepada pemerintah untuk mengusut atau menindak PT Kiho Bali Korin apabila mengabaikan tanggungjawab sosialnya. Dengan adanya pertanggungjawaban social PT Kiho Bali Korin baik yang menyangkut bidang kemasyarakatan, lingkungan dan bidang ketenagakerjaan melalui laporan pertanggungjawaban social PT Kiho dapat pula mendorong terciptanya tanggungjawab social PT Kiho yang diharapkan mampu meminimalisir permasalahan-permasalahan social yang mungkin timbul dan dan dihadapi oleh PT Kiho Bali Korin.

PT Kiho Bali Korin merasa perlu untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya karena selain berbagai manfaat yang akan diperoleh PT Kiho Bali Korin, perusahaan juga akan mendapatkan manfaat yang akan diperoleh PT Kiho dalam jangka panjang yaitu:

1. Keterlibatan PT Kiho Bali Korin dalam masalah social merupakan respon terhadap keinginan dan harapan masyarakat terhadap peranan PT Kiho Bali korin, dalam jangka panjang hal ini akan sangat menguntungkan bagi PT Kiho Bali Korin yaitu terciptanya hubungan yang harmonis dengan masyarakat yang berada disekitar PT Kiho Bali Korin.
2. Keterlibatan PT Kiho Bali Korin terhadap masalah social dapat mempengaruhi perbaikan lingkungan, masyarakat yang mungkin akan menurunkan biaya produksi PT Kohi Bali Korin.
3. Meningkatkan nama baik PT Kiho Bali Korin sehingga akan menimbulkan simpati langganan, simpati karyawan, investor, pemerintah, dan masyarakat sekitar kepada PT Kiho Bali Korin.

4. Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat, karena campur tangan pemerintah cenderung membatasi peranan PT Kiho Bali Korin, sehingga PT Kiho Bali Korin memiliki tanggung jawab social mungkin dapat menghindari pembatasan kegiatan PT Kiho Bali Korin oleh pemerintah.
5. Untuk menunjukkan respon positif PT Kiho Bali Korin terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga PT Kohi Bali Korin akan mendapat simpati dari masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat mengurangi tensi kebencian masyarakat terhadap PT Kiho Bali Korin apabila PT Kiho Bali Korin melakukan kegiatan yang tidak disetujui oleh masyarakat.

4.4. Model Alternatif Laporan Pertanggungjawaban Sosial

PT Kiho Bali Korin dapat membuat sendiri model pelaporan pertanggungjawaban sosialnya karena belum adanya standar baku dalam akuntansi pertanggungjawaban sosial. Pelaporan pertanggungjawaban sosial ini merupakan bagian atau suplemen dari laporan keuangan yang terpisah dari laporan keuangan, sehingga dari laporan pertanggungjawaban sosial nantinya akan menambah nilai dari laporan keuangan tersebut dan dapat meningkatkan sosial performance perusahaan.

Kelompok biaya sosial Sesuai dengan aturan FASB tahun 1999 semua informasi yang tidak bisa dikategorikan dalam laporan keuangan utama bisa dimasukkan dalam media pelaporan yang lain, demikian pula dengan informasi biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas sosial dan lingkungan ini bisa dirangkum dalam suatu wujud pelaporan pertanggungjawaban sosial sebagai pelengkap bagi

laporan keuangan. Bentuk laporan tersebut bisa disesuaikan jenisnya, apakah dengan laporan yang menggunakan pendekatan deskriptif, pendekatan biaya yang dikeluarkan atau pendekatan biaya dan manfaat ekonomi sosial.

Apabila dilihat dari lokasi dalam laporan tahunan, banyak perusahaan yang memanfaatkan bagian catatan kaki sebagai sarana untuk mengungkapkan aktivitas sosialnya. Bervariasinya cara memilih media pengungkapan tanggungjawab sosial ini nampaknya didasarkan kepada kelaziman dan untuk kepentingan kelompok tertentu. Seperti pengungkapan biaya pengelolaan lingkungan lebih banyak perusahaan yang memilih media laporan prospektus, karena laporan prospektus ini bisa digunakan sebagai ajang propaganda pada saat perusahaan menjual saham perdananya di bursa efek. Pengungkapan tersebut minimal memberikan kesan bahwa perusahaan sudah memiliki kepedulian dan dalam pengelolaan lingkungan dan diharapkan dengan adanya pengungkapan ini dapat menarik para calon investor agar tertarik membeli saham perusahaan tersebut. Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan mengenai kesejahteraan pegawai, masyarakat di luar perusahaan dan biaya pemantauan produksi pada umumnya memilih media laporan tahunan dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini disebabkan pada kelaziman yang dilakukan oleh perusahaan.

Model yang dapat dijadikan acuan dalam melaporkan aktivitas pertanggungjawaban sosialnya dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan adalah:

1) *Inventory approach*

Dampak-dampak sosial, baik positif maupun negatif diungkap dalam bentuk deskripsi. Pengungkapan dalam satuan moneter dilakukan bila data tersedia. Dalam pendekatan ini, perusahaan dapat menyusun dan mengungkapkan informasi tentang aktivitas pertanggungjawaban sosial perusahaan secara lengkap. Adapun aktivitas pertanggungjawaban sosial dibagi dalam enam bidang, yaitu :

1. Lingkungan

Meliputi aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan pengendalian dan pelestarian lingkungan.

2. Energi

Meliputi aktivitas dalam pengaturan penggunaan energi dalam hubungannya dengan operasional perusahaan dan efisiensi terhadap produk perusahaan

3. Sumber Daya Manusia

Meliputi aktivitas untuk kepentingan karyawan sebagai Sumber Daya Manusia bagi perusahaan. Aktivitas tersebut antara lain ; program pelatihan dan peningkatan keterampilan, upah, gaji dan tunjangan, fasilitas pegawai, keselamatan kerja dan sebagainya.

4. Keterlibatan masyarakat

Memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Kegiatannya antara lain; pemberian sumbangan, bantuan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

5. Produk

Meliputi aktivitas perusahaan dalam memperhatikan produk, seperti; kualitas produk, keamanan produk, periklanan, dan lain-lain

6. Lain-lain

Meliputi aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori 1 sampai 5.

Pendekatan inventory approach dapat menjelaskan aktivitas dan program social perusahaan dengan lengkap dan jelas, tetapi di lain pihak pendekatan ini cenderung bersifat kualitatif deskriptif sehingga informasi secara kuantitatif moneter sangat sedikit. Berikut ini penulis berdasarkan data-data yang diperoleh dari PT Koho Bali Korin mencoba menerapkan pelaporan pertanggungjawaban sosial dengan menggunakan metode Inventory approach:

PT Kiho Bali Korin

Laporan Pertanggungjawaban Sosial

31 Desember 2002

1. Lingkungan

Dalam bidang lingkungan, perusahaan telah melaksanakan program pengolahan sampah, karena limbah yang dihasilkan oleh PT Kiho berbentuk padat dan tidak membahayakan lingkungan, pengolahan masalah sampah ini cukup dikelola oleh petugas bagian PU yang kemudian ditempatkan di bak sampah dan dibuang di TPA. Program lainnya adalah program pemeriksaan air bersih, program pemeriksaan kebisingan dan kadar debu di lingkungan perusahaan dengan

melakukan kerja sama dengan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan di bawah pengawasan Departemen Kesehatan RI.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam bidang ini Perusahaan menyediakan berbagai fasilitas bagi karyawan yang berupa sarana kesehatan dengan melakukan kerja sama dengan beberapa Rumah Sakit yang dekat dengan lokasi perusahaan, sarana ibadah dan sarana olah raga. Selain itu dengan pemberian berbagai macam tunjangan dan penghargaan kerja sesuai dengan kebijakan perusahaan. Perusahaan juga menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan oleh karyawan untuk menambah kenyamanan karyawan dalam menjalankan rutinitasnya.

3. Kepedulian terhadap Keterlibatan Masyarakat dan Pemerintah

Dalam bidang ini perusahaan banyak melakukan rekrutment para pekerjanya sekitar 350 orang tenaga kerja merupakan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat disekitar perusahaan, karena perusahaan bertujuan membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta mengatasi masalah pengangguran, selain itu juga perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk disekitar perusahaan. Perusahaan juga mengadakan program koreasi yang beranggotakan karyawan perusahaan, dimana karyawan perusahaan sebagian besar adalah masyarakat sekitar. Wujud lain dari tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberikan bantuan dan sumbangan pada masyarakat baik itu sumbangan dan bantuan berupa bantuan fisik maupun materi.

4. Bidang Produk

Dalam bidang ini, perusahaan mengembangkan produk sarung tangan golf yang berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari produk unggulan yang dihasilkan oleh perusahaan yang 100% orientasi ekspor dengan negara tujuan yaitu USA, Kanada dan Australia. Perusahaan juga selalu melakukan inovasi secara terus menerus terhadap produk yang dihasilkan, produk sarung tangan golf PT Kohi selalu diawasi secara ketat oleh tenaga ahli dari Korea, hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas agar tetap baik dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas dan mutu produk jadi yang sesuai dengan standar Internasional.

2) *Cost approach*

Pendekatan ini melihat dari sudut pandang perusahaan, yaitu dengan cara mengungkapkan berapa *cost* yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan pertanggungjawaban sosial yang dilakukannya. Pendekatan ini tidak berorientasi pada *constituents* perusahaan, sehingga tidak mengungkapkan berapa *social cost* dan *benefit cost* yang timbul. Pendekatan ini merupakan kebalikan dari pendekatan Inventory Approach, Informasi yang lebih ditekankan di dalam pendekatan ini lebih bersifat kuantitatif moneter, informasi kualitatif hanya sebatas tema aktivitas sosial yang akan diungkapkan. Berikut ini di halaman 77 merupakan contoh format laporan pertanggungjawaban sosial dengan menggunakan metode Cost approach yang dapat dilampirkan melalui catatan kaki dalam laporan laba rugi perusahaan.

PT Kiho Bali Korin**Laporan Laba Rugi**

Periode yang berakhir 31 Desember 2002

Pendapatan

Penjualan	58.918.125.000
Harga pokok penjualan	32.734.000.000
Laba kotor penjualan	<u>26.184.125.000</u>

Beban Operasi

Beban penjualan:

Beban Pengiriman	2.760.960.500
Beban Perlengkapan penjualan	376.650.000
Beban penyusutan penjualan	495.750.500
Jumlah beban penjualan	<u>3.985.325.000</u>

Beban administrasi dan umum:

Beban gaji dan upah	2400.000.000
Beban pemeliharaan & perbaikan	586.350.000
Beban penyusutan	764.560.000
Beban adm & umum lain	791.970.000
Jumlah beban adm dan umum	<u>4.342.880.000</u>

Jumlah beban operasi	<u>8.328.205.000</u>
----------------------	----------------------

Laba bersih sebelum pos luar biasa dan pajak	<u>17.855.920.000</u>
---	-----------------------

Beban lain-lain (2.a)	<u>332.587.900</u>
-----------------------	--------------------

Laba bersih setelah pos luar biasa	<u>17.523.332.100</u>
---	-----------------------

Pajak penghasilan	<u>5.239.499.630</u>
-------------------	----------------------

Laba bersih	<u>12.283.832.470</u>
--------------------	-----------------------

Laporan pertanggungjawaban sosial ini merupakan laporan suplemen atau sebagai pendukung dari laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban sosial ini untuk mengungkapkan biaya-biaya sosial yang dalam laporan laba rugi dikategorikan sebagai beban lain-lain atau dikategorikan dalam pos luar biasa, sebagai contoh beban lain-lain dalam laporan laba rugi tahun 2002 diatas dapat disusun sebagai berikut:

2.a Beban Lain-lain

Beban lain –lain sebesar Rp 332.587.900 merupakan dana yang dikeluarkan oleh PT Kiho Bali Korin untuk membiayai berbagai aktivitas sosial perusahaan, berikut ini rincian biaya-biaya yang dikelurkn intuk membiayai aktivitas social PT Kiho Bali Korin dengan menggunakan metode cost approach:

PT Kiho Bali Korin	
Laporan Pertanggungjawaban Sosial	
31 Desember 2002	
Personal Outlay	2002
Sumbangan kepada karyawan	Rp 8.750.500
Asuransi pekerjaan	16.350.000
Pelayanan kesehatan	7.220.550
THR	57.450.000
Sumbangan untuk perkawinan dan kelahiran	7.675.000
Seragam pekerjaan dan peralatan perlindungan	<u>23.450.000</u> ₊

Total Rp 120.896.050

Customer Outlay

Riset dan pengembangan Rp. 39.270.500 +
 Total Rp. 39.270.500

Environmental Service Outlay

Pengendalian polusi RP 17.850.500
 Pengembangan wilayah dan bangunan 65.300.350
 Iuran retribusi sampah 23.535.000 +
 Total Rp 106.685.850

Community service Outlay

Sumbangan untuk yayasan amal Rp 6.535.000
 Sumbangan pembangun jalan 55.250.000
 Sumbangan pembangunan tempat ibadah 3.950.500
 Total +
 Rp 6 5.735.500

Jumlah Total

Rp 332.587.900

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. PT Kiho Bali Korin telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap karyawan, masyarakat, pemerintah dan lingkungan tetapi belum membuat laporan pertanggungjawaban sosial.
2. Penulis mengusulkan dibuatnya laporan pertanggungjawaban sosial yang akan menjelaskan tentang apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
3. PT Kiho Bali Korin tidak hanya dituntut untuk memenuhi tujuannya dalam hal mencari keuntungan, tetapi juga dituntut untuk bertanggungjawab terhadap dampak sosial yang timbul akibat kegiatan usaha yang dilaksanakannya, dan kemudian dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Sosial perusahaan.
4. Belum adanya standar yang baku dan disepakati bersama mengenai metode dalam pelaporan pertanggungjawaban sosial seharusnya tidak menjadi penghalang bagi PT Kiho Bali Korin dan untuk melaporkan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosialnya.

5. PT Kiho Bali Korin akan mendapatkan keuntungan apabila menerapkan Pelaporan Pertanggungjawaban sosial,. Manfaat yang dapat diperoleh PT Kiho Bali Korin antara lain; mendapatkan simpati dari masyarakat, meningkatkan citra dan nama baik perusahaan, terhindar dari *political cost*, menambah kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dan berguna bagi perusahaan untuk jangka panjang.

5.2. Saran

Dari penulisan skripsi ini, beberapa saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Kepada PT Kiho Bali Korin penulis menyarankan agar menerapkan pelaporan pertanggungjawaban sosialnya sebagai media komunikasi dan pertanggungjawaban bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka melakukan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat, karena banyaknya manfaat yang akan didapatkan oleh PT Kiho Bali Korin.
2. Model pelaporan yang dibuat penulis hanya sebagai contoh laporan pertanggungjawaban sosial yang dapat dibuat perusahaan. PT Kiho Bali Korin dapat membuat sendiri model pelaporan pertanggungjawaban sosialnya disesuaikan dengan kondisi perusahaan saat ini, karena belum adanya standar baku yang mengatur tentang pembuatan laporan pertanggungjawaban sosial.
3. Peran dan penerapan pelaporan pertanggungjawaban sosial perlu dikembangkan di PT Kiho Bali Korin khususnya, untuk dapat mendorong

terciptanya tanggung jawab sosial perusahaan, yang diharapkan mampu meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapinya, sehingga tercipta iklim investasi yang sehat dan stabilitas ekonomi yang tangguh.

4. IAI beserta seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan Ilmu Akuntansi diharapkan berusaha untuk melakukan usaha-usaha dalam penyusunan Standar Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial sebagai dasar penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan.